

***AN ANALYSIS OF THE EFFECTS OF LOCAL FINANCIAL PERFORMANCE
ON ECONOMIC GROWTH IN JAVA IN THE 2018-2022 PERIOD***

**ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI PULAU JAWA PERIODE 2018-2022**

Muhammad Bararah Doris Putra

Program Studi Ekonomi Keuangan dan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Brawijaya
m.bararah.dp@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the effect of regional financial performance (efficiency and effectiveness ratios) on economic growth in the Java Island province. This research uses a quantitative analysis method using several instruments such as tables and graphs and ratio analysis that can reflect the description of the research analysis in an organized and mutually supportive manner. In addition, quantitative analysis is carried out using econometric models. The type of data used in this study is panel data and data from 2018 to 2022. based on the results of the analysis conducted by this study, it can be concluded that regional financial performance in the form of Efficiency Ratio has no significant effect on economic growth in Java Island. Meanwhile, regional financial performance in the form of the Effectiveness Ratio has a significant effect on economic growth in Java Island.

Keywords: *Efficiency Ratio, Effectiveness Ratio, Economic Growth.*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kinerja keuangan daerah (rasio efisiensi dan efektivitas) terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan menggunakan beberapa instrumen seperti tabel dan grafik serta analisis rasio-rasio yang dapat mencerminkan uraian analisis penelitian secara teratur dan saling mendukung. Selain itu, analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan model ekonometrika. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel serta data dari tahun 2018 hingga tahun 2022. berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kinerja keuangan daerah berupa Rasio Efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Sedangkan Kinerja keuangan daerah berupa Rasio Efektivitas berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa.

Kata Kunci: Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas, Pertumbuhan Ekonomi.

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan ekonomi membawa banyak perubahan, sebagai kebebasan berekspresi, hingga sistem administrasi sebelumnya sentralistik sebagai desentralisasi. Desentralisasi atau otonomi daerah telah diterapkan di Indonesia dari tahun 2001, dengan tujuan agar kepala daerah dapat mempertanggungjawabkan di bawah pimpinannya, serta menggunakan sumber daya lokal untuk mengoptimalkan pembangunan di daerahnya masing-masing (Hartono et al., 2020). Apalagi dengan otonomi daerah, kualitas

pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakatnya akan meningkat, baik pelayanan langsung kepada masyarakat maupun pelayanan tidak langsung seperti pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya (Christia & Ispriyarso, 2019). Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memiliki dasar hukum yang tertuang pada UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemda dan UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemda yang kemudian direvisi dengan UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda dan UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

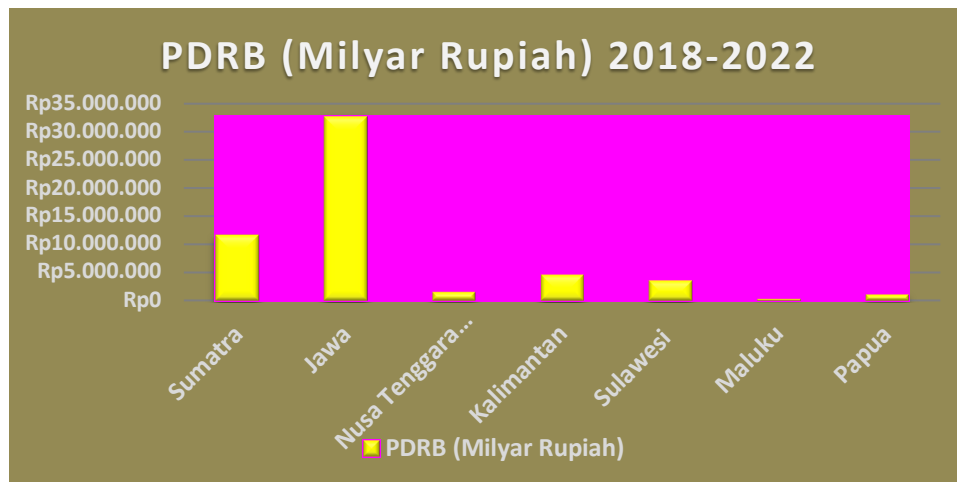
Pusat dan Pemda.

Sebagai rangka melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah harus merencanakan dana tahunan yang akan diterima dan dikeluarkan untuk satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencatat pendapatan dan belanja. APBD juga dapat menunjukkan kapasitas pemerintah daerah untuk mendanai seluruh kegiatan evolusioner (Susanto, 2014). Pengelolaan keuangan daerah yang efektif memiliki dampak positif terhadap perkembangan suatu daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut (Kristian et al., 2020). APBD mensyaratkan agar setiap pemerintah daerah dapat merealisasikan anggaran yang telah disetujui, khususnya pendapatan daerah yang merupakan sumber utama realisasi anggaran.

Pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan daerah lain yang sah (Asari & Suardana, 2018). Dibidang keuangan, kemandirian suatu daerah sangat tergantung pada kemampuannya mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Zukhri, 2020). Dengan PAD yang tinggi, wilayah akan maju dan berkembang secara ekonomis, yang akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang pesat (Sari et al., 2016). Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber dayanya, terutama sumber daya keuangan, secara efektif. Kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan cara ini (Tiara & Ananda, 2016). Dua indikator kinerja keuangan daerah yang akan dipakai pada penelitian ini adalah rasio efektivitas dan rasio efisiensi, kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan cara ini (Tiara & Ananda, 2016).

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menjelaskan perbandingan antara jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dan pendapatan yang diterima secara keseluruhan (Fathah, 2017). Dengan melihat banyak biaya direalisasikan dengan mengumpulkan pendapatan daerah dan dibanding dengan belanja daerah, rasio efisiensi adalah salah satu rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah (Harahap et al., 2021). Semakin rendah rasio ini, semakin efisien, dan sebaliknya. Dengan asumsi bahwa biaya sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi rencana (Kumpangpune et al., 2019). Pengeluaran yang lebih efektif akan terjadi di wilayah yang lebih efisien, yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat (Azhari et al., 2020). Jadi secara teori, rasio efisiensi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional dengan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Keberhasilan program daerah akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi dengan mengeluarkan biaya yang optimal dan memperoleh pemasukan yang banyak (Azhari et al., 2020).

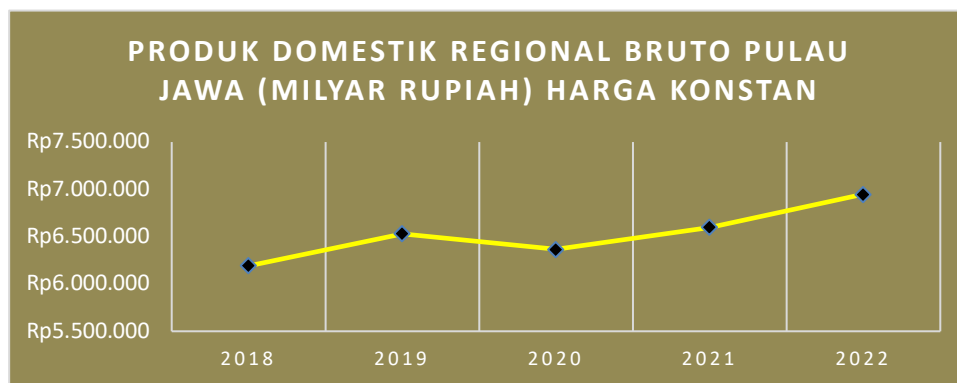
Keberhasilan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan yang akan dicapai dikenal sebagai rasio efektivitas. Rasio ini akan diubah dan dibanding dengan aturan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Harahap et al., 2021). Salah satu indikator keberhasilan daerah dengan mengeksplorasi potensi unggulannya adalah PAD yang tinggi (Widodo, 2021). Menggunakan rasio efektivitas sangat penting dalam analisis ekonomi regional karena memberikan gambaran yang mendalam tentang sejauh mana sumber daya digunakan secara optimal.



Gambar 1. Grafik PDRB Nasional Tahun 2018-2022
Sumber: Badan Pusat Statistik Diolah (2023)

PRDB di Pulau Jawa merupakan PDRB terbesar di Indonesia pada periode 2018-2022. Pulau Jawa sendiri terdiri dari 6 provinsi, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Dari 6 provinsi tersebut yang memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar dipegang oleh Provinsi DKI

Jakarta dengan nilai sebesar Rp9.173.272 (Milyar Rupiah). Pulau Jawa masih memegang peran yang cukup signifikan dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data diatas dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi maka dapat dikatakan bahwa Pulau Jawa masih menjadi salah satu pusat perekonomian di Indonesia.



Gambar 2. Grafik PDRB Pulau Jawa 2018-2022
Sumber: Badan Pusat Statistik Diolah (2023)

Grafik diatas merupakan grafik yang menunjukkan pergerakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Jawa periode 2018-2022. Dapat dilihat dari pergerakannya pada tahun 2018 ke 2019 terdapat kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 5,60%. Lalu pada tahun 2019 ke 2020 terjadi penurunan sebesar 2,66%. Hal ini diakibatkan oleh pandemi yang terjadi yaitu pandemi COVID 19 yang memuncak pada tahun 2020. Akibat

pandemi ini sendiri banyak sektor ekonomi yang mengalami penurunan salah satu yang mengalami penurunan sendiri yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Jawa. Selanjutnya pada tahun 2020 ke 2021 terjadi kenaikan kembali sebesar 4,04% dikarenakan pada tahun ini pandemi yang diakibatkan oleh Virus COVID 19 sudah membaik serta keluar berbagai kebijakan pemerintah seperti *New Normal*. Pada tahun 2021 ke 2022 terjadi kenaikan yang cukup signifikan yaitu

sebesar 5,26% hal ini terjadi karena pandemi COVID 19 sudah mulai

berhenti dan perekonomian sudah berjalan kembali normal khususnya di Pulau Jawa.

Tabel 1. Rata-Rata Pulau Jawa periode 2018-2022

Tahun	Rasio PDRB	Rasio Efisiensi	Rasio Efektivitas
2022	5.26%	98.61%	104.89%
2021	4.04%	98.06%	95.88%
2020	-2.66%	99.87%	80.08%
2019	5.60%	100.78%	103.16%
2018	5.75%	97.96%	108.78%
Rata-rata	3.60%	99.06%	98.56%

Sumber: Peneliti, 2023 (diolah)

Grafik diatas merupakan gambaran dari rata-rata kinerja keuangan daerah Pulau Jawa melalui Rasio Efisiensi dan Rasio Efektivitas serta grafik tersebut juga memperlihatkan rata-rata Rasio PDRB di Pulau Jawa selama periode 2018-2022. Dapat dilihat bahwa Rasio PDRB Pulau Jawa memiliki rata-rata 3,60% dari periode 2018-2022. Pada Rasio Efisiensi sendiri memiliki rata-rata 99,06% dari periode

2018-2022, hal ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan daerah Pulau Jawa dari sisi Efisiensi masih tergolong efisien. Namun, pada tahun 2019 memiliki nilai yang lebih dari 100%. Pada Rasio Efektivitas memiliki rata-rata 98,56% pada periode 2018-2022, hal ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan daerah Pulau Jawa dari sisi Efektivitas sudah tergolong tinggi. Pada tahun 2022, 2019, dan 2018 memiliki nilai diatas 100%.

Tabel 2. Rata-Rata Pulau Sumatera periode 2018-2022

Tahun	Rasio PDRB	Rasio Efisiensi	Rasio Efektivitas
2022	4.63%	100.11%	112.54%
2021	3.38%	95.92%	105.38%
2020	-1.26%	100.13%	85.15%
2019	4.56%	101.46%	95.84%
2018	4.71%	96.72%	98.14%
Rata-rata	3.20%	98.86%	99.41%

Sumber: Peneliti, 2023 (diolah)

Sebagai pembanding dengan Pulau Jawa, disini terdapat grafik yang menggambarkan rata-rata kinerja keuangan daerah Pulau Sumatera melalui Rasio Efisiensi dan Rasio Efektivitas serta grafik tersebut juga memperlihatkan rata-rata Rasio PDRB di Pulau Jawa selama periode 2018-2022. Pulau Sumatera sendiri memiliki tingkat perekonomian tertinggi kedua setelah Pulau Jawa jika dilihat dari PDRB, hal ini bisa dilihat pada Tabel 1. Dapat dilihat bahwa Rasio PDRB Pulau

Sumatera memiliki rata-rata 3,20% dari periode 2018-2022. Pada Rasio Efisiensi sendiri memiliki rata-rata 98.86% dari periode 2018-2022, hal ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan daerah Pulau Sumatera dari sisi Efisiensi tergolong cukup efisien. Namun, pada tahun 2022, 2020, dan 2019 memiliki nilai yang lebih dari 100%. Pada Rasio Efektivitas memiliki rata-rata 99.41% pada periode 2018-2022, hal ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan daerah Pulau Sumatera dari sisi Efektivitas

sudah tergolong tinggi. Perbedaan dengan Pulau Jawa adalah pada Pulau Jawa nilai Rasio Efisiensi lebih sedikit tinggi dibanding Pulau Sumatera, namun Pulau Jawa memiliki nilai Rasio PDRB yang lebih tinggi dibanding Pulau Sumatera.

Penelitian yang dilakukan oleh Kristian et al (2020) mendapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah maka akan berdampak baik juga ke alokasi belanja modal. Begitu juga dengan semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah akan berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi. Dalam Penelitian menemukan bahwa terdapat faktor lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi melalui otonomi daerah selain 3 faktor utama (akumulasi belanja modal, pertumbuhan populasi, dan hal-hal yang berkaitan dengan penambahan pekerja) yaitu kinerja keuangan. Kinerja keuangan yang dimaksud pada penelitian ini adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio belanja modal, dan rasio derajat desentralisasi fiskal.

Penelitian yang dilakukan oleh Ratnawati & Sari (2023) mendapatkan hasil yang sama dengan penelitian diatas yaitu kinerja keuangan daerah khususnya rasio kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti tinggi rendahnya kemandirian kinerja keuangan daerah akan berdampak juga terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal yang membuat tingkat kemandirian keuangan daerah tinggi adalah tinggi atau rendahnya pendapatan asli daerah (PAD). PAD sendiri merupakan aspek penting dari kemandirian suatu daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Hera et al (2021) mendapatkan hasil dimana Secara parsial, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah, yang diwakili oleh rasio efektivitas. Hal ini dapat diartikan bahwa

kemampuan kinerja keuangan yang optimal dan efektif dapat membantu pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk kinerja keuangan daerah lain yaitu rasio kemandirian dan efisiensi secara parsial tidak memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk kemandirian tidak memengaruhi pertumbuhan ekonomi diakibatkan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil. Dan untuk efisiensi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi diakibatkan oleh pengelolaan keuangan yang masih kurang efisien.

Dari latar belakang diatas timbul pertanyaan bagaimana pengaruh kinerja keuangan daerah (rasio efektivitas dan efisiensi) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Pulau Jawa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kinerja keuangan daerah (rasio efektivitas dan efisiensi) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Pulau Jawa. Penelitian ini dilakukan hanya berfokus kepada provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa dipilih karena berdasarkan data diatas Pulau Jawa memiliki PDRB tertinggi di Indonesia. Hal ini mengakibatkan Pulau Jawa memiliki peran yang penting untuk perekonomian nasional. Penelitian ini juga memperbarui penelitian sebelumnya dengan menggunakan data yang terbaru yaitu Periode 2018-2022 karena berfokus pada era sebelum pandemi, saat terjadi pandemi, dan setelah terjadi pandemi. Research Gap dalam penelitian ini terletak pada perbandingan antara teori federalisme fiskal, yang menekankan pentingnya desentralisasi fiskal yang memungkinkan kinerja keuangan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan beberapa temuan penelitian sebelumnya. Menurut teori federalisme fiskal, desentralisasi fiskal yang memungkinkan otonomi keuangan daerah seharusnya memberikan dorongan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, beberapa penelitian sebelumnya mungkin tidak selalu mendukung hubungan ini secara konsisten. Kesenjangan pengetahuan muncul karena ada ketidaksesuaian antara harapan teori

federalisme fiskal dan temuan empiris yang telah ditemukan. Selain itu pada penelitian ini juga nantinya akan menggunakan pendekatan analisis regresi data panel yang akan memberikan pandangan berbeda atau memperkuat penelitian-penelitian sejenis tetapi menggunakan pendekatan berbeda.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian kuantitatif berbasis positivisme dan digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu. Ini mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian dan menganalisis data secara kuantitatif atau statistik untuk memvalidasi hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016). Analisis kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Ini dilakukan dengan menggunakan alat seperti tabel dan grafik serta analisis rasio-rasio, yang secara teratur dan saling mendukung menjelaskan analisis. Selain itu, model ekonometrika dan program digunakan untuk melakukan analisis kuantitatif. Setelah mempelajari fungsi ilmu ekonomi, ekonomika mencakup penggunaan statistik matematik pada data ekonomi untuk memberikan dukungan empiris terhadap model yang dibangun berdasarkan matematika ekonomi dan menghasilkan hasil dalam bentuk angka. Data penelitian yang digunakan dalam pendekatan ini adalah angka-angka, dan statistik digunakan untuk analisisnya, oleh karena itu dikenal dengan metode kuantitatif.

Studi ini menggunakan informasi berjenis sekunder kinerja keuangan Provinsi Pulau Jawa mencakup Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas, Pertumbuhan Ekonomi tahun 2018-2022 dengan data panel. Data panel merupakan gabungan dari time series dan cross section. Pada penelitian ini

terdapat data dari periode 2018-2022 (time series) dan 6 Provinsi Pulau Jawa (cross section). Jumlah observasi data dalam penelitian ini sebanyak 30 observasi.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menelusuri pada berbagai sumber seperti variabel Pertumbuhan Ekonomi melalui PDRB diperoleh dari website www.bps.go.id dan untuk variabel kinerja keuangan daerah melalui laporan realisasi APBD Pemprov yang diperoleh dari website <https://djpk.kemenkeu.go.id/>.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel. Analisis regresi data panel adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh beberapa peubah prediktor terhadap satu peubah respon dengan struktur data berupa data panel (Alamsyah et al., 2022). Berikut merupakan model yang dipakai secara umum untuk regresi data panel:

$$Y = \alpha + \beta_1 X1_{(it)} + \beta_2 X2_{(it)} + \epsilon_{(it)}$$

Keterangan:

Y = Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB)

X1 = Rasio Efisiensi

X2 = Rasio Efektivitas

$\beta_1 - \beta_2$ = Koefisien Regresi pada masing-masing variabel independent

ϵ = Error term

Lalu dilanjutkan dengan pemilihan model regresi data panel yang terdiri dari 3 model yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Dilanjut dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji Multikolinieritas uji heteroskedastisitas. Dan terakhir dilakukan uji hipotesis yang terdiri dari Uji Koefisien Determinasi (R^2) dan Uji Parsial (t).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Chow**Tabel 3.** Hasil Uji Chow

Uji Chow		
Effect Test	Statistic	Prob.
Cross-section F	6.602604	0.0007
Cross-section Chi-square	27.495822	0.0000

Sumber: Peneliti, 2023 (diolah)

Dari hasil Uji Chow Test diatas terlihat bahwa *Prob. Cross-section Chi-square* yaitu $0,00 < 0,05$. Sehingga dapat ditarik kesimpulan model pilihan adalah *Fixed Effect Model*. Oleh karena itu uji test dilanjutkan untuk menentukan model mana yang akan dipilih antara

Fixed Effect Model atau *Random Effect Model*. Untuk mengetahuinya maka dilakukan Uji Hausman Test. Berikut terlampir hasil Uji Hausman Test dengan menggunakan eviviews:

Uji Hausman**Tabel 4.** Hasil Uji Hausman

Uji Hausman		
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Prob.
Cross-section F	32.639018	0.0000

Sumber: Peneliti, 2023 (diolah)

Dari hasil Uji Hausman Test diatas terlihat bahwa *Prob. Cross-section random* yaitu $0,00 < 0,05$. Sehingga dapat ditarik kesimpulan model yang ditentukan adalah *Fixed Effect Model*. Karena model *Fixed Effect Model* yang terpilih maka uji Lagrange Multiplier (LM) tidak perlu dilakukan dan variabel akan diuji menggunakan model *Fixed*

Effect Model.

Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini akan dilakukan dua uji asumsi klasik yaitu uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

Uji Multikolinieritas**Tabel 5.** Hasil Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas		
	X1	X2
X1	1.000000	-0.04314
X2	-0.043143	1.000000

Sumber: Peneliti, 2023 (diolah)

Dari hasil pengujian multikolinearitas mendapat hasil bahwa korelasi antar variabel independen sebesar -0,043143. Dikarenakan nilai korelasi antar variabel independen

berada dibawah 0,80 maka dapat dikatakan data pada penelitian ini lolos uji multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas**Tabel 6.** Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Glejser	
Variable	Prob.
C	0.1782
X1	0.4687
X2	0.0579

Sumber: Peneliti, 2023 (diolah)

Dari hasil Uji Glejser diatas terlihat bahwa *Prob.* X1 sebesar 0,4687 > 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel X1 bebas dari heteroskedastisitas. Dari hasil Uji Glejser diatas terlihat bahwa *Prob.* X2 sebesar 0,0579 > 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel X2 bebas dari heteroskedastisitas.

Persamaan Regresi Data Panel

$$Y_{it} = -0.256786 + 0.039967 X1 + 0.256878 X2$$

Besarnya konstanta adalah -0.26

yang berarti jika variabel bebas yaitu rasio efektivitas dan rasio efisiensi tak berubah atau tetap konstan sehingga Pertumbuhan Ekonomi akan turun sebesar 26%. Konstanta pada variabel rasio efisiensi adalah 0,40, yang berarti jika variabel lain tetap konstan dan rasio efisiensi naik 1%, Pertumbuhan Ekonomi naik 40%. Sementara nilai konstanta pada variabel rasio efektivitas adalah 0,26, artinya jika variabel lain tetap konstan dan rasio efektivitas naik 1%, Pertumbuhan Ekonomi naik 26%.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Variable	Coefficient
R-squared	0.784283
Adjusted R-squared	0.715646
S.E. of regression	0.017462
F-statistic	11.42651
Prob (F-statistic)	0.000005

Sumber: Peneliti, 2023 (diolah)

Dari hasil regresi diketahui bahwa nilai *Adjusted R-squared* adalah 0,7156 (71,56%) yang berarti bahwa kontribusi atau sumbangan dari variabel bebas kinerja keuangan daerah yang terdiri dari Rasio Efisiensi dan Rasio Efektivitas

terhadap variasi turunnya variabel pertumbuhan ekonomi adalah 71,56%. Variabel tambahan yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini menyumbang 28,44%.

Hasil Uji t

Tabel 8. Hasil Uji t-Statistic

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	-0.256786	0.116586	-2.202542	0.0384
X1	0.039967	0.110482	0.361751	0.7210
X2	0.256878	0.028965	8.868635	0.0000

Sumber: Peneliti, 2023 (diolah)

Dari hasil uji t diatas dapat dilihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

- Hasil uji t variabel Rasio Efisiensi (X1) mendapat nilai t hitung sebesar $0,361 < t \text{ table sebesar } 2,052$ serta nilai signifikansi sebesar $0,721 > 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Rasio Efisiensi (X1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- Hasil uji t variabel Rasio Efektivitas (X2) mendapat nilai t hitung sebesar $8,869 > t \text{ table sebesar } 2,052$ serta nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Rasio Efektivitas (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Pembahasan

Pengaruh Rasio Efisiensi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dari hasil pengujian hipotesis statistik mendapat hasil rasio efisiensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2015) yang mendapat hasil rasio efisiensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh tingginya gaji PNS. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Fathah, 2017). Rasio efisiensi yang tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi diakibatkan oleh tidak seimbangnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam sisi operasional dan investasi (Hidaya & Hasbiullah, 2023).

Tabel 9. Belanja Operasi Pulau Jawa Periode 2018-2022

Belanja Operasi						
Provinsi	DKI JAKARTA	JAWA BARAT	JAWA TENGAH	DI YOGYAKARTA	JAWA TIMUR	BANTEN
2022	63.70%	41.53%	47.10%	52.66%	48.71%	51.52%
2021	65.41%	34.34%	42.68%	47.03%	42.21%	41.47%
2020	64.24%	28.57%	41.28%	43.16%	41.86%	41.37%
2019	65.95%	30.16%	42.65%	50.01%	42.54%	42.35%
2018	63.14%	30.25%	42.94%	52.94%	39.82%	38.83%
Rata-rata	64.49%	32.97%	43.33%	49.16%	43.03%	43.11%

Sumber: Peneliti, 2023 (diolah)

Tabel diatas merupakan perbandingan belanja operasi pemerintah daerah terhadap keseluruhan total belanja daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial (2019). Belanja operasi yang ada pada tabel tersebut merupakan belanja pegawai dan belanja barang dan

jasa dikarenakan kedua belanja tersebut memiliki proporsi dan nilai yang paling tinggi diantara belanja operasi yang lain. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Provinsi di Pulau Jawa memiliki belanja operasi sebesar 30-60% dari belanja daerahnya. Menurut Tiara & Ananda (2016) setiap pengeluaran pemerintah mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi. Namun pada tabel diatas besarnya belanja operasi belum mampu untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Menurut (Kemenkeu & USAID EGSA,

2021) hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor seperti banyaknya karyawan di lembaga pemerintahan tanpa rincian tugas yang jelas serta belanja barang dan

jasa di pergunakan untuk pengeluaran yang tidak bersifat investasi, seperti anggaran perjalanan dinas.

Tabel 10. Belanja Modal Pulau Jawa Periode 2018-2022

Belanja Modal						
Provinsi	DKI JAKARTA	JAWA BARAT	JAWA TENGAH	DI YOGYAKARTA	JAWA TIMUR	BANTEN
2022	13.58%	7.30%	7.16%	12.93%	0.08%	14.72%
2021	11.14%	5.46%	5.60%	11.84%	5.82%	11.12%
2020	6.09%	4.39%	3.89%	17.31%	5.90%	10.06%
2019	17.79%	7.06%	8.03%	18.67%	8.16%	12.18%
2018	22.99%	9.44%	6.87%	21.39%	9.26%	13.64%
Rata-rata	14.32%	6.73%	6.31%	16.43%	5.84%	12.34%

Sumber: Peneliti, 2023 (diolah)

Tabel diatas merupakan perbandingan belanja modal pemerintah daerah terhadap keseluruhan total belanja daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa belanja modal terdiri dari belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja bangunan dan gedung; belanja jalan, irigasi, dan jaringan; belanja aset tetap lainnya; dan belanja aset lainnya (2019). Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Provinsi di Pulau Jawa memiliki belanja operasi sebesar 5-16% dari belanja daerahnya. Nilai ini sangat jauh dibandingkan belanja operasionalnya. Diharapkan belanja modal akan memiliki efek multiplier yang cukup bagi perekonomian daerah (Kemenkeu & USAID EGSA, 2021). Hal ini terjadi dikarenakan pada umumnya rasio pengeluaran modal dibandingkan dengan pengeluaran daerah 5-20% bagi pemerintah daerah yang memiliki pendapatan tinggi, pemerintah daerah

yang memiliki pendapatan yang tinggi biasanya telah memiliki aset modal yang mencukupi (Mahmudi, 2019).

Pengaruh Rasio Efektivitas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dari hasil pengujian hipotesis statistik mendapat hasil rasio efektivitas sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sari et al (2016) yang mendapat hasil rasio efektivitas berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari nilai koefisien regresinya adalah sebesar 0,2568 yang artinya dengan asumsi variabel lain, pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 25,68% jika kenaikan 1% pada rasio efektivitas tetap konstan yaitu rasio efisiensi. Rasio efektivitas merupakan gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Yanto & Astuti, 2020).

Tabel 11. Rasio Efektivitas Pulau Jawa Periode 2018-2022

Rasio Efektivitas (X2)						
Provinsi	DKI JAKARTA	JAWA BARAT	JAWA TENGAH	DI YOGYAKARTA	JAWA TIMUR	BANTEN
2022	81.94%	108.84%	99.38%	110.64%	123.30%	105.25%
2021	80.18%	81.12%	98.13%	102.76%	116.33%	96.74%

2020	65.00%	73.43%	85.46%	86.73%	97.41%	72.43%
2019	90.29%	107.48%	102.31%	108.39%	114.87%	95.61%
2018	97.21%	111.70%	105.52%	117.69%	118.21%	102.35%
Rata-rata	82.92%	96.51%	98.16%	105.24%	114.02%	94.48%

Sumber: Peneliti, 2023 (diolah)

Menurut Mahmudi (2019) Rasio Efektivitas yang memiliki nilai diatas 90% dapat dikategorikan cukup efektif dan yang memiliki nilai diatas 100% dapat dikategorikan sangat efektif. Berdasarkan Tabel 10 dapat dilihat bahwa mayoritas Provinsi di Pulau Jawa memiliki nilai efektivitas diatas 90%. Pada Tabel 10 juga terlihat di tahun 2020 terjadi penurunan efektivitas secara massal dikarenakan pandemi COVID 19. Namun, Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa dapat memperbaiki hal itu dengan cukup baik karena dapat meningkatkan rasio efektivitasnya 2 tahun setelah pandemi COVID 19. Pada Tabel 1 rasio efektivitas di Pulau Jawa memiliki rata-rata 96,78% yang menandakan bahwa Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa sudah cukup efektif dalam kinerja keuangan daerahnya. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa mampu untuk merealisasikan pendapatan asli daerah sesuai dengan potensi riil daerah masing-masing. Pada Tabel 1 tahun 2018,2019, dan 2022 Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa mendapat nilai rasio efektivitas lebih dari 100%, hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa mampu untuk merealisasikan pendapatan asli daerah lebih tinggi dari yang dianggarkan/direncanakan dan rasio efektivitasnya dapat dikategorikan sangat efektif. Dengan PAD yang tinggi, wilayah akan maju dan berkembang secara ekonomis, yang akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang pesat (Sari et al., 2016).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa

rasio efisiensi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Pulau Jawa. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Sehingga hipotesis yang menyatakan rasio efisiensi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terdukung. Rasio Efektivitas PAD berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Pulau Jawa. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Sehingga hipotesis yang menyatakan rasio efektivitas berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi terdukung.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya mengambil data observasi pada periode penelitian terbatas hanya dalam kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2018 – 2022. Dalam penelitian ini juga terfokus pada Provinsi Pulau Jawa saja. Rasio kinerja keuangan yang digunakan pada penelitian ini untuk mengukur pengaruh hanya tergantung pada Rasio Efisiensi dan Rasio Efektivitas saja.

Saran

Dari hasil penelitian diatas berikut saran untuk Pemerintah Provinsi Pulau Jawa selaku pemangku kebijakan. Untuk rasio efisiensi sudah efisien, namun belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat diakibatkan oleh belanja pemerintah yang tidak fokus pada investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Belanja investasi disini dapat berupa pelatihan pegawai,

pembelian alat elektronik atau teknologi yang dapat menunjang pelayanan lebih baik, dan belanja modal yang ditingkatkan jika ingin mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dari sisi rasio efektivitas mayoritas Pemerintah Provinsi Pulau Jawa sudah dikatakan cukup efektif. Bagi Pemerintah Provinsi yang masih memiliki rata-rata rasio efektivitas dibawah 90% dapat dikatakan kurang efektif. Dalam hal ini sebaiknya dapat memaksimalkan lagi potensi rill daerah tersebut dikarenakan daerah yang memiliki PAD yang tinggi akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menambahkan jumlah sampel, tahun periode penelitian serta dapat menambahkan daerah lain untuk meneliti dengan jangkauan yang lebih luas. Selain itu juga peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel rasio kinerja keuangan daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, I. F., Esra, R., Awalia, S., & Nohe, D. A. (2022). Analisis Regresi Data Panel Untuk Mengetahui Faktor Yang Memengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Di Kalimantan Timur. *Prosiding Seminar Nasional Matematika, Statistika, Dan Aplikasinya*, 2, 254–266.
- Aryawati, N. P. A., & Sudana, I. P. (2018). Kinerja Keuangan Memediasi Dana Perimbangan, Alokasi Belanja Daerah Pada Indeks Pembangunan Manusia Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 13(1), 28.
- Asari, N. M. A., & Suardana, K. A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pada Belanja Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25(2), 877–904.
- Astuti, W. (2015). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Periode 2007-2011). *Jurnal Ebbank*, 6(1), 1–18.
- Azhari, M., Zulfa, A., & Murtala. (2020). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Manajemen Indonesia (J-Mind)*, 5(1), 81–94.
- Caraka, R. E., & Yasin, H. (2017). *Spatial Data Panel*.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149–163.
- Farhani, S. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Ketimpangan Pendapatan Pada Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb Universitas Brawijaya*, 10(2).
- Fathah, Ri. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan Untuk Penilaian Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Ebbank*, 8(1), 33–48.
- Garzarelli, G. (2019). Old And New Theories Of Fiscal Federalism, Organizational Design Problems, And Tiebout. *Journal Of Public Finance And Public Choice*, 22(1–2), 91–104.
- Harahap, A. W., Mas'ut, Ilmiha, J., & Effendi, S. (2021). Analisis Growth Ratio, Rasio Efektivitas Dan Efisiensi Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (Jram)*, 8(1), 39–44.
- Harahap, J. P. R., Daulay, M., & Torong, Z. B. (2018). Pengaruh Faktor-Faktor Kinerja Keuangan, Size, Leverage, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Alokasi Belanja Modal

- Sebagai Variabel Moderating Pada Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Kitabah: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 47–64.
- Hartono, Heriyanto, M., & Yuliani, F. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15(4), 558–568.
- Hera, M. R., Panjaitan, F., & Novika. (2021). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Provinsi Di Pulau Jawa. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Keuangan (Jabk), Stie-Ibek*, 8(2), 63–69.
- Hidaya, Muh. F., & Hasbiullah. (2023). Analisis Efisiensi Keuangan Daerah Dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal Of Regional Economics*, 4(2), 56–69.
- Kemenkeu, & Usaid Egsa. (2021). *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal Di Indonesia*.
- Kresnandra, A. A. N. A. (2016). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Dana Perimbangan Dan Investasi Swasta Sebagai Variabel Pemoderasi*.
- Kristian, J., Yanto, F., & Astuti, S. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen*, 2(3), 346–357.
- Kumpangpune, N., Saerang, D. P. E., & Engka, D. S. M. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(3), 60–77.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (4th Ed.). Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Ykpn.
- Nadi, L., Utami, T., & Sari, S. (2021). *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro* (Vol. 1). Wwv.Unpam.Ac.Id
- Nurulita, S., Arifulsyah, H., & Yefni. (2018). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Riau. *Jurnal Benefita*, 3(3), 336–356.
- Oates, W. (1993). The Role Of Fiscal Decentralization In Economic Growth. *National Tax Journal*, 46(2), 237–245.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. 12 (2019).
- Piętak, Ł. (2014). Review Of Theories And Models Of Economic Growth. *Comparative Economic Research. Central And Eastern Europe*, 17(1), 45–60. <https://doi.org/10.2478/Cer-2014-0003>
- Puspita, D., Pahlevi, M., Raharja, Y. M., Hadi, S., Baroto, A. L., Permana, A. W., & Rahayu, W. T. (2021). *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal Di Indonesia*.
- Rahman, A., & Altin, D. (2023). Literatur Review: Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Kinerja Dan Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 25(1), 104–116.
- Rahman, A. Z., & Saputra, F. L. (2022). Efisiensi Dan Efektivitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap. *Humanika : Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 22(2), 117–126.
- Ratnawati, & Sari, R. P. (2023). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada Provinsi Di Pulau Kalimantan

- Dan Sumatera Periode 2020-2022). *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 12(2), 125–133.
- Rinova, R., & Dewi, F. G. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Daerah Pemekaran Di Pulau Sumatera). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 24(2), 133–144.
- Rohanda, A. (2022). Studi Literatur: Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (Jmas)*, 3(3), 174–182.
- Sari, G. N., Kindangen, P., & Rotinsulu, T. O. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan Di Sulawesi Utara Tahun 2004 – 2014. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(2), 1–19.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta.
- Susanto, H. (2014). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 10(1), 15–26.
- Tiara, F. I., & Ananda, C. F. (2016). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Mahasiswa Feb Universitas Brawijaya*, 4(2).
- Widarjono, A. (2005). *Ekonometrika: Teori Dan Aplikasi Untuk Ekonomi Dan Bisnis* (1st Ed., Vol. 1).
- Widodo, S. (2021). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Dengan Variabel Belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintahan Provinsi Tahun 2015-2019. *Jurnal Budget*, 6(1), 169–187.
- Widodo, S. (2023). Pengaruh Pendapatan Transfer Pusat, Pendapatan Asli Daerah Dan Pembiayaan Daerah Terhadap Belanja Modal Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 8(1), 71–84.
- Yanto, J. K. F., & Astuti, S. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisini Dan Akuntansi*, 2(3), 346–357.
- Zakiah, K. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Tahun 2016-2020. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 7(2), 364–378.
- Zuhri, M., & Soleh, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 187–195.
- Zukhri, N. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau Dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, Dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 143–149.